

**DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
EFISIENSI SEKTOR PUBLIK
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006-2011)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**WIBISONO SOKO SUSILO
NIM. C2B009075**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Wibisono Soko Susilo

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009075

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis /IESP

Judul Skripsi : **DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP EFISIENSI SEKTOR
PUBLIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah 2006-2011)**

Dosen Pembimbing : Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.

Semarang, 23 Juli 2013

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.)

NIP. 196901211997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Wibisono Soko Susilo
Nomor Induk Mahasiswa : C2B009075
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis /IESP
Judul Skripsi : **DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP EFISIENSI SEKTOR
PUBLIKDAN PERTUMBUHA EKONOMI
(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah 2006-2011)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji:

1. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. (.....)
2. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si, Ph.D. (.....)
3. Dr. Nugroho SBM, MSP. (.....)

Semarang, 12 Agustus 2013

Pembantu Dekan I,

(Anis Chariri, S.E, M.Com, Ph.D, Akt)

NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Wibisono Soko Susilo, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2011), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan tulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 23 Juli 2013

Yang membuat pernyataan,

(Wibisono Soko Susilo)

NIM : C2B009075

ABSTRACT

Fiscal decentralization is the concept of regional autonomy to set local independence of a region. However, in practice it turned out that decentralization has not been able to improve public service delivery and economic growth. This can be seen during the year 2006 until the year of 2011 the provision of public services such as health and education do not meet the set targets. As well as the economic growth in Central Java province also satisfying the target set yet.

This study aims to analyze the impact of fiscal decentralization on public sector efficiency and economic growth in 35 regencies / cities in Central Java Province. The method of analysis used in this study, namely: Public Sector Performance (PSP) and the Public Sector Efficiency (PSE), while measuring the efficiency of the public sector and linear regression (OLS) with common effect to measure the impact to economic growth. Both use the study period from 2006 to 2011. Type of data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) Central Java Province and other literature such as books, and economic journals.

Analysis results indicate that the efficiency of the public sector in Central Java province efficient provision of public services is only happening in big cities. While at the Regency still get efficient score is below the average. Then regression analysis showed that the variables of fiscal decentralization, local taxes, labor and agglomeration shows a positive and significant impact on economic growth in the province of Central Java.

Keywords: *Autonomous Region, Fiscal Decentralization, Public Service, Economic Growth*

ABSTRAKSI

Desentralisasi fiskal merupakan konsep dalam otonomi daerah untuk mengatur kemandirian lokal suatu daerah. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata desentralisasi ini belum bisa memperbaiki penyediaan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terlihat selama tahun 2006 sampai tahun 2011 penyediaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan belum memenuhi target yang ditetapkan. Serta dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah juga Belum memenuhi target yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap efisiensi sektor publik dan pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: *Public Sector Performance* (PSP) dan *Public Sector Efficiency* (PSE), sedangkan mengukur efisiensi sektor publik dan regresi linear (OLS) dengan *common effect* untuk mengukur pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi. Keduanya menggunakan rentang waktu penelitian 2006-2011. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan literatur-literatur lainnya seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi.

Hasil analisa efisiensi sektor publik menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah penyediaan layanan publik yang efisien hanya terjadi di kota besar saja. Sedangkan pada daerah Kabupaten masih mendapatkan skor efisien dibawah rata-rata. Kemudian analisa regresi menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal, pajak daerah, tenaga kerja dan aglomerasi menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, Penyediaan Layanan Publik, Pertumbuhan Ekonomi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT pemilik alam semesta atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mempunyai semangat dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2011)”.

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S-1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Skripsi ini merupakan sebuah karya yang tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Dr. Hadi Sasana, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Fitri Arianti, S.E, M.Si, selaku Dosen Wali atas segala arahannya selama penulis menempuh pendidikan dan seluruh dosen jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan.
4. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Drs. Handoyo DW, M.Sidan ibunda tercinta Sri Hunun Hartiyani, S.H, yang selalu mendidik dan memberikan mendoakan, memotivasi, mengarahkan dan membimbing penulis tanpa kenal lelah. Terima kasih atas kesabaran dan limpahan kasih sayangnya

5. Kakak dan adik tercinta: Haryo Punto Susilo, S.T dan Oghie Bagas Pramana Susila, yang selalu mendorong dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
6. Keluarga besar IESP FE UNDIP 2009. Yogi, Rudy, Ifam, Dogol, Aples, Arya, Tihis, Chika, Ferdy, dkk. Terima kasih atas tawa, duka, kerjasama, kekompakan, dan rasa kekeluargaannya selama ini.
7. Teman-teman yang sering direpotkan selama kuliah dan ngerjain skripsi, Riska, Tutus, Shuna, Chanif, Andri, Qhey, Furry, Cinta, Ditya, Kaisar, dll.
8. Keluarga besar PRISMA UNDIP, Terima kasih telah berbagi tentang tanggung jawab, kekeluargaan dan ilmu fotografi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata, dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Semarang, 23 Juli 2013

Penulis,

Wibisono Soko Susilo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	22
1.3. Tujuan Penelitian.....	23
1.4. Kegunaan Penelitian.....	23
1.5. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1. Landasan Teori.....	26
2.1.1. Otonomi Daerah.....	26
2.1.2. Desentralisasi Fiskal.....	27
2.1.3. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	28
2.1.4. Konsep Efisiensi.....	29
2.1.5. Efisiensi Sektor Publik.....	30
2.1.6. Pertumbuhan Ekonomi.....	30
2.1.7. Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi Sektor Publik.....	32
2.1.8. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi.....	33

2.2.	Penelitian Terdahulu.....	33
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	37
2.4.	Hipotesis.....	39
BAB III	METODE PENELITIAN.....	40
3.1.	Hipotesis.....	40
3.1.1.	Variabel Penelitian.....	40
3.1.2.	Definisi Operasional.....	41
3.2.	Jenis dan Sumber Data.....	46
3.3.	Metode Analisis.....	47
3.3.1	Alat Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Sektor Publik.....	47
3.3.2.	Alat Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	51
3.3.2.1.	Estimasi Model Regresi.....	52
3.3.2.2.	Pengujian Asumsi Klasik.....	53
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	61
4.1.1.	Provinsi Jawa Tengah.....	61
4.1.2.	Kesehatan.....	61
4.1.2.1.	Angka Kematian Bayi.....	61
4.1.2.2.	Angka Harapan Hidup.....	63
4.1.2.3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan.....	65
4.1.3.	Pendidikan.....	67
4.1.3.1.	Angka Partisipasi Sekolah SD.....	67
4.1.3.2.	Angka Partisipasi Sekolah SMP.....	69
4.1.3.3.	Angka Melek Huruf.....	71
4.1.3.4.	Rata-rata Lama Sekolah.....	73
4.1.4.	Kemiskinan.....	75

4.1.5.	Distribusi Pendapatan.....	77
4.1.6.	Stabilitas Ekonomi.....	79
4.1.7.	Kinerja Ekonomi.....	81
4.1.7.1.	PDRB per kapita.....	81
4.1.7.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	84
4.1.8.	Pertumbuhan Ekonomi.....	87
4.1.9.	Desentralisasi Fiskal.....	89
4.1.10.	Pajak Daerah.....	91
4.1.11.	Tenaga Kerja.....	93
4.1.12.	Aglomerasi.....	95
4.2.	Analisis Data.....	97
4.2.1	Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Sektor Publik....	97
4.2.1.1.	Indeks <i>Public Sector Performance</i> (PSP).....	97
4.2.1.2.	Indeks <i>Public Sector Efficiency</i> (PSE).....	107
4.2.2.	Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi...	118
4.2.2.1.	Pengujian Asumsi Klasik.....	118
4.2.2.1.1.	Uji Multikolinearitas.....	118
4.2.2.1.2.	Uji Autokorelasi.....	119
4.2.2.1.3.	Uji Heterokedasitas.....	119
4.2.2.1.4.	Uji Normalitas.....	120
4.2.2.2.	Hasil Analisis Regresi.....	120
4.2.2.2.1	Koefisien Determinasi (R ²).....	121
4.2.2.2.2	Uji Signifikan Simultan (Uji-f).....	122
4.2.2.2.3	Uji Signifikan Individual (Uji-t).....	122
4.2.2.3.	Interpretasi Hasil.....	124
BAB V	PENUTUP.....	129
5.1.	Kesimpulan.....	129
5.2.	Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Dana Perimbangan Pemerintah Pusat Untuk Daerah di Indonesia Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	4
Tabel 1.2.	Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	5
Tabel 1.3.	Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	6
Tabel 1.4.	Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	10
Tabel 1.5.	Angka Melek Huruf di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	11
Tabel 1.6.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	13
Tabel 1.7.	Angka Harapan Hidup di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	14
Tabel 1.8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	16
Tabel 1.9.	Jumlah Penerimaan Pajak di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	18
Tabel 1.10.	Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2011.....	20
Tabel 4.1.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	62
Tabel 4.2.	Angka Harapan Hidup di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	64
Tabel 4.3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	66
Tabel 4.4.	Angka Partisipasi SD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	68

Tabel 4.5.	Angka Partisipasi SMP di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	70
Tabel 4.6.	Angka Melek Huruf di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	72
Tabel 4.7.	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	74
Tabel 4.8.	Proporsi Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	76
Tabel 4.9.	Indek Gini di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	78
Tabel 4.10.	Laju Inflasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	80
Tabel 4.11.	PDRB per Kapita di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	83
Tabel 4.12.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	86
Tabel 4.13.	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	88
Tabel 4.14.	Dentralisasi Fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	90
Tabel 4.15.	Pajak Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	92
Tabel 4.16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	94
Tabel 4.17.	Aglomerasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 sampai Tahun 2011.....	96
Tabel 4.18.	<i>Public Sector Performance</i> (PSP) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006.....	98

Tabel 4.19.	<i>Public Sector Performance</i> (PSP) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.....	99
Tabel 4.20.	<i>Public Sector Performance</i> (PSP) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.....	101
Tabel 4.21.	<i>Public Sector Performance</i> (PSP) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.....	103
Tabel 4.22.	<i>Public Sector Performance</i> (PSP) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.....	105
Tabel 4.23.	<i>Public Sector Performance</i> (PSP) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.....	107
Tabel 4.24.	Indeks <i>Public Sector Efficiency</i> (PSE) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006.....	109
Tabel 4.25.	Indeks <i>Public Sector Efficiency</i> (PSE) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.....	110
Tabel 4.26.	Indeks <i>Public Sector Efficiency</i> (PSE) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.....	112
Tabel 4.27.	Indeks <i>Public Sector Efficiency</i> (PSE) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.....	113
Tabel 4.28.	Indeks <i>Public Sector Efficiency</i> (PSE) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.....	115
Tabel 4.39.	Indeks <i>Public Sector Efficiency</i> (PSE) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.....	117
Tabel 4.30.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	118
Tabel 4.31.	Uji Heterokedasitas	119
Tabel 4.32.	Uji Normalitas.....	120
Tabel 4.33.	Ringkasan Hasil Estimasi Regresi.....	121
Tabel 4.34.	Hasil Regresi.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wanger.....	29
-------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan hal yang baru di Indonesia. Hal ini karena otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah berjalan selama lebih dari satu dekade sejak disahkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Tetapi, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia baru berjalan efektif pada tahun 2001. Kebijakan ini dilakukan agar dapat tercipta efisiensi dalam pemerintahan, kestabilan perekonomian, dan pertumbuhan ekonomi. Setiap daerah mempunyai cara sendiri dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan system ini disebabkan karena tiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Konsep awal otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam sistem pemerintahan di Indonesia mulai dianut semenjak lengsernya era orde baru. Tepatnya setelah lengsernya pemerintahan presiden Soeharto. Desentralisasi fiskal merupakan kosep dalam otonomi daerah untuk mengatur kemandirian lokal suatu daerah dalam mengurus berbagai macam urusan. Hal ini tujuannya agar pertumbuhan perekonomian serta peningkatan pendapatan daerah dapat meningkat yang akhirnya dapat merangsang pembangunan di daerah-daerah. Akan tetapi, desentralisasi fiskal di setiap daerah di Indonesia tidak semuanya berjalan lancar. Hal ini dikarenakan permasalahan yang tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Oleh sebab itu, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia menyebabkan hasil yang berbeda di setiap daerahnya.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sebenarnya telah diakomodasikan dalam pasal 18 UUD tahun 1945. Didalam undang-undang tersebut telah menyadari adanya keragaman yang merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Sehingga negara Republik Indonesia pada saat itu menganut pemerintahan terpusat, namun dengan menyadari heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maka desentralisasi atau distribusi kekuasaan/kewenangan perlu dialirkan kepada daerah otonom.

Di masa orde baru melalui Undang-Undang No.5 tahun 1974 telah melahirkan pemerintahan daerah yang kuat dan stabil karena adanya kepentingan politis, atau dominannya pemerintah pusat dari pemerintah daerah. Pada saat itu dikenal ungkapan bahwa pusat adalah pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat. Namun, pelaksanaannya mengalami deviasi karena dominasi pemerintahan pusat semakin besar yang kemudian menyebabkan ketergantungan daerah ke pusat menjadi lebih besar.

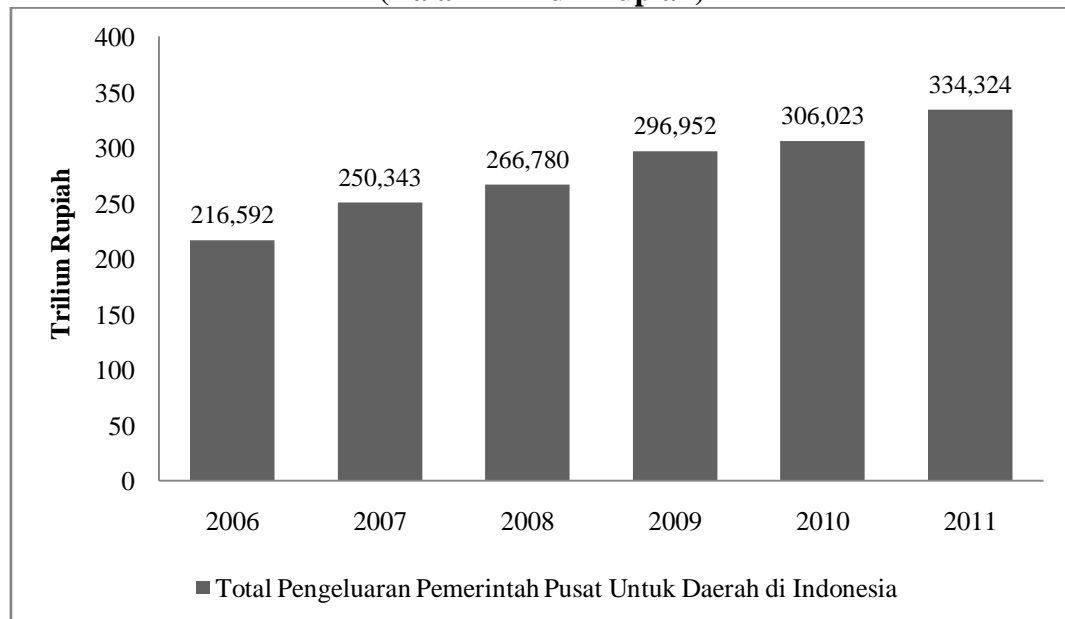
Setelah lengsernya era orde baru, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi langkah besar pada masa presiden Habibie. Langkah ini ditandai dengan diundang-undangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tetapi, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia baru berjalan efektif pada tahun 2001. Kemudian undang-undang tersebut direvisi pada UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam hal ini adalah wewenang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal maka dapat dilihat bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab antar pemerintah pusat dan daerah. Selain memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri, pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah juga bagian dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Walaupun demikian, antara pemerintah pusat dengan daerah memiliki hubungan yang erat. Maksud dari hubungan yang erat ini adalah pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada daerah otonom. Selain itu pemerintah juga berperan dalam pembuatan kebijakan yang bersifat strategis. Karena itu, antara daerah otonom dengan pemerintah pusat saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri.

Pemerintah pusat juga mempunyai sistem hubungan keuangan dengan pemerintah daerah. Sistem hubungan keuangan ini merupakan suatu mekanisme distribusi sejumlah dana anggaran pusat ke daerah dalam kerangka otonomi daerah. Konsep perimbangan keuangan antara pusat ke daerah adalah konsekuensi dari adanya tanggung jawab terhadap kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Hal ini sesuai aturan yang tertera dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Dalam undang-undang tersebut maksud dari perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian wewenang serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan

keuangannya. Sedangkan yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Di Indonesia perimbangan pemerintah pusat ke daerah dibagi menjadi tiga, meliputi : dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Tabel 1.1.
Dana Perimbangan Pemerintah Pusat Untuk Daerah di Indonesia
Tahun 2006 sampai Tahun 2011
(Dalam Triliun Rupiah)

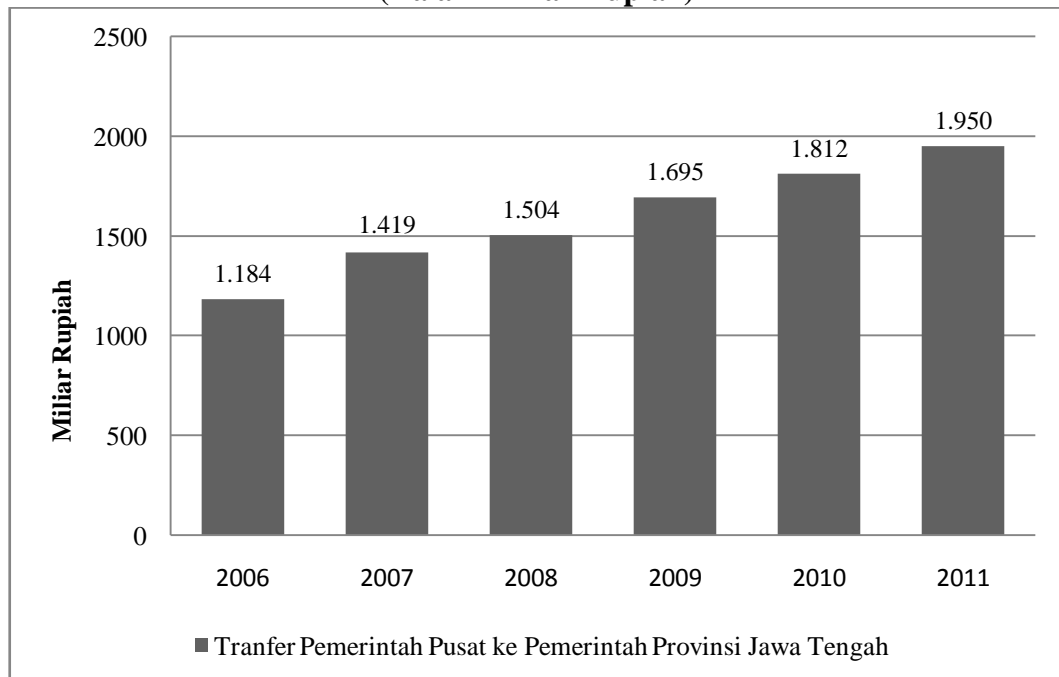


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Satu dekade lebih pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah dijalankan di Indonesia. Dari tahun ke tahun pemerintah Indonesia semakin serius dalam menerapkan sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini dapat dilihat dari dana perimbangan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi di Indonesia yang tiap tahun mengalami peningkatan. Terlihat bahwa enam tahun terakhir dari tahun 2006 sampai 2011 dana transfer pemerintah pusat untuk daerah

terus meningkat. Tahun 2006 dana perimbangan sebesar 216.592 triliun rupiah terus meningkat sampai terakhir data yang dikeluarkan pada tahun 2011 dana transfer pemerintah pusat untuk pemerintah provinsi di Indonesia sebesar 334,324 triliun rupiah. Peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah di Indonesia juga berpengaruh terhadap meningkatnya besar transfer pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.2.
Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006 sampai Tahun 2011
(Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Terlihat bahwa transfer pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Terpantau dari enam tahun terakhir, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terus mengalami peningkatan dari mulai tahun 2006 sebesar 1,1 triliun rupiah terus meningkat sampai terakhir data menampilkan pada tahun 2011 transfer pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah

menunjukkan sebesar 1,9 triliun rupiah. Kenaikan tersebut juga berbanding lurus terhadap Realisasi pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.3.
Realisasi Pengeluaran Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006 sampai Tahun 2011

o.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kab. Cilacap	816.841.516	872.609.934	943.952.955	953.995.787	988.063.134	1.052.767.972
2	Kab. Banyumas	716.353.230	715.730.127	770.566.134	841.333.701	877.104.740	966.209.854
3	Kab. Purbalingga	458.909.392	551.424.711	546.273.592	552.967.244	544.264.416	628.936.355
4	Kab. Banjarnegara	508.823.876	533.980.011	587.833.092	609.869.013	698.675.279	665.117.865
5	Kab. Kebumen	621.253.275	667.503.559	719.568.559	750.787.266	757.911.747	858.748.139
6	Kab. Purworejo	507.335.442	540.332.435	608.506.570	634.036.320	628.258.498	680.373.020
7	Kab. Wonosobo	453.582.822	466.009.738	518.017.994	539.252.944	540.908.242	590.620.642
6	Kab. Magelang	601.169.686	634.337.010	679.547.311	722.517.398	757.580.426	792.962.448
9	Kab. Boyolali	568.245.881	602.078.580	671.516.649	696.575.409	689.906.463	754.906.151
10	Kab. Klaten	725.221.005	779.127.519	851.604.341	841.073.105	845.975.282	919.493.785
11	Kab. Sukoharjo	505.263.085	535.324.821	588.369.602	631.388.892	620.123.840	665.303.658
12	Kab. Wonogiri	608.529.370	642.073.552	705.841.542	744.953.455	734.169.315	797.438.376
13	Kab. Karanganyar	501.675.628	537.018.341	598.405.031	634.208.547	624.771.772	666.052.488
14	Kab. Sragen	565.911.940	589.545.059	638.420.507	636.207.252	726.522.382	722.853.146
15	Kab. Grobogan	597.126.311	631.266.262	688.951.703	695.617.456	746.052.421	800.014.694
16	Kab. Blora	501.331.825	572.642.706	615.642.427	621.823.360	617.321.328	705.981.503
17	Kab. Rembang	436.050.620	437.253.202	485.820.548	501.618.170	505.523.045	575.645.947
18	Kab. Pati	610.513.156	647.003.967	714.534.542	752.673.931	745.708.225	804.097.139
19	Kab. Kudus	475.539.077	552.470.021	590.952.702	599.799.512	570.170.671	693.995.492
20	Kab. Jepara	508.391.857	550.743.663	615.648.378	646.486.642	670.274.785	719.734.400
21	Kab. Demak	491.340.600	524.308.321	581.445.335	608.626.724	601.421.995	660.635.269
22	Kab. Semarang	502.613.283	530.422.048	594.185.154	619.173.656	661.256.406	689.534.416
23	Kab. Temanggung	424.485.785	455.857.886	497.563.581	515.288.881	522.184.894	572.376.602
24	Kab. Kendal	509.212.141	533.302.721	585.359.371	641.676.764	643.064.281	699.909.095
25	Kab. Batang	408.406.974	437.572.485	491.714.098	521.237.716	503.871.859	560.543.801
26	Kab. Pekalongan	444.512.763	486.164.793	563.069.985	567.654.080	592.088.962	651.032.991
27	Kab. Pemalang	578.083.000	579.326.011	631.081.770	685.823.814	728.760.540	777.631.068
28	Kab. Tegal	602.288.179	597.765.487	675.775.409	716.802.303	752.624.072	823.810.557
29	Kab. Brebes	704.138.699	716.724.254	777.429.993	807.183.629	866.018.136	918.458.584
30	Kota Magelang	253.545.555	276.703.276	302.133.886	307.435.557	298.383.145	336.514.571
31	Kota Surakarta	431.505.300	451.279.770	513.400.412	548.324.528	608.035.953	673.191.257
32	Kota Salatiga	240.234.011	253.276.995	277.098.276	293.570.138	285.798.622	314.727.941
33	Kota Semarang	823.180.390	773.905.286	885.911.757	1.006.676.476	967.153.007	953.040.271
34	Kota Pekalongan	263.500.418	287.395.798	325.082.674	332.018.658	317.580.141	348.586.447
35	Kota Tegal	224.106.178	267.742.567	291.459.721	303.728.259	296.502.755	315.095.516
	JUMLAH	18.189.222.270	19.230.222.916	21.132.685.601	22.082.406.587	22.534.030.779	24.356.341.460

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Data Diolah)

Realisasi pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini terlihat dari jumlah realisasi pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2006 jumlah realisasi pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 18,19 miliar rupiah. Kemudian tiap tahunnya terus

mengalami peningkatan sampai terakhir pada tahun 2011 sebesar 24,36 miliar. Namun, dari jumlah realisasi pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat tersebut, apabila dilihat secara teliti ternyata terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tidak mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Kabupaten/kota tersebut meliputi: Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pati, kabupaten Kudus, Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Kabupaten/kota tersebut tidak mengalami peningkatan pada tahun-tahun tertentu.

Peningkatan jumlah pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah juga mempengaruhi dalam penyediaan layanan publik. Penyediaan layanan publik ini merupakan salah satu wewenang yang dilipahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelimpahan tersebut didasarkan karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan kondisi daerahnya sendiri. Sehingga terjadi efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Menurut Hyman (2008) ada tiga fungsi dalam penyediaan barang publik yang tidak lepas dari peranan dan fungsi pemerintah, yaitu: fungsi distribusi, fungsi alokasi, dan fungsi stabilisasi yang memberikan pengaruh terhadap alokasi pengeluaran belanja pemerintah (*public expenditure*). Namun dalam pelaksanaannya, kemampuan keuangan pemerintah berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat akan penyediaan infrastruktur. Maksudnya adalah kebutuhan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan berbagai fasilitas layanan publik bagi seluruh masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah relatif terbatas. Padahal kesejahteraan masyarakat menurut Von Braun (2002) dilihat dari pemenuhan layanan publik

dasar yang seperti: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dianggap akan memiliki hubungan langsung terhadap tingkat kemiskinan di dalam masyarakat.

Dalam memenuhi layanan publik perlu adanya efisiensi dalam penyediaannya layanan publik itu sendiri. Maksud dari efisiensi layanan publik tersebut adalah bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini adalah keuangan daerah secara akurat dan optimal, untuk kemudian menghasilkan sejumlah output atau layanan publik. Sebuah proyek dalam penyediaan publik akan diberi persetujuan apabila memenuhi analisis biaya-manfaat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan layanan publik dapat memberikan atau tidak bagi masyarakat. Apabila biaya yang diberikan proyek tersebut dapat memberikan manfaat atau keuntungan, maka penyediaan layanan publik tersebut dapat dikatakan efisien dan diberi persetujuan dalam penyediaannya. Hal ini dikarenakan efisiensi merupakan salah satu parameter teoritis yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu pemerintahan.

Kurnia (2006) dalam penelitiannya mengenai efisiensi penyediaan layanan publik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pasca diberlakukannya kebijakan otonomi daerah lebih tepatnya pada tahun 2001 dan 2002 mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam penyediaan layanan publik tidak efisien dalam penggunaannya. Sehingga sering kali dampak dari otonomi daerah terkesan jauh dari tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Dalam penyediaan barang publik, indikator yang sering digunakan merupakan indikator-indikator yang terdapat didalam MDGs yaitu meliputi penyediaan layanan pendidikan dan penyediaan layanan kesehatan. Indikator ini

sama seperti yang diungkapkan oleh Von Braun (2002), dimana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan layanan publik dasar yang seperti: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dianggap akan memiliki hubungan langsung terhadap tingkat kemiskinan di dalam masyarakat. Dalam penyediaan layanan pendidikan sendiri, salahsatu cara untuk melihat indikator ini adalah melihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan angka melek huruf.

Angka partisipasi sekolah adalah persentase jumlah penduduk yang masih sekolah pada tingkat tertentu di suatu daerah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari data yang ditampilkan angka partisipasi sekolah di Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi dua jenjang yaitu jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sebenarnya sudah memenuhi target MDGs yang ditentukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,08%. Namun, dalam pertumbuhannya mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata Angka Partisipasi Sekolah di Jawa Tengah dari tahun 2006 sebesar 98,47% terus meningkat sampai pada tahun 2010 sebesar 98,95%, namun pada tahun 2011 menurun sebesar 98,65%. Pertumbuhan yang fluktuatif tidak hanya terlihat pada rata-rata di Jawa Tengah. Akan tetapi apabila dilihat secara teliti, pertumbuhan angka partisipasi sekolah dasar pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah semuanya mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), pertumbuhan angka partisipasi sekolah pada jenjang tersebut belum memenuhi target yang ditentukan dalam MDGs. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan angka partisipasi

sekolah pada jenjang SMP sebesar 98,26%. Terlihat pada tahun 2006 sebesar 83,41% terus meningkat hingga pada tahun 2011 mencapai 88,39%. Tetapi angka tersebut belum memenuhi target yang ditentukan sebesar 98,26%. Pada tingkat Kabupaten/Kota target angka partisipasi sekolah SMP hanya kota Salatiga di tahun 2011 yang memenuhi target yaitu sebesar 99,21%.

Tabel 1.4.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP
Di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006 sampai Tahun 2011
(Persen)

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun											
		SD						SMP					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kab. Cilacap	99,25	98,25	98,59	99,56	99,45	98,63	85,85	83,76	84,11	83,22	85,74	91,91
2.	Kab. Banyumas	98,55	99,73	99,38	98,86	98,74	98,81	86,05	89,91	89,51	90,04	87,74	86,56
3.	Kab. Purbalingga	95,72	98,21	98,33	99,13	99,38	97,69	77,58	84,87	85,24	85,64	86,85	84,76
4.	Kab. Banjarnegara	95,85	97,52	97,79	98,31	98,95	96,95	74,69	67,39	66,67	68,01	75,88	71,76
5.	Kab. Kebumen	98,15	98,85	98,61	98,45	98,8	97,43	88,29	91,17	90,95	80,84	91,56	91,36
6.	Kab. Purworejo	98,87	99,63	99,25	99,61	99,17	99,4	89,57	88,25	87,83	92,53	89,54	92,01
7.	Kab. Wonosobo	96,4	96,62	97,22	97,58	98,75	98,22	71,25	57,88	58,17	69	66,03	80,46
6.	Kab. Magelang	99,65	98,36	98,63	98,07	98,32	98,7	81,73	79,58	78,59	84,83	77,21	89,35
9.	Kab. Boyolali	98,36	98,03	98,26	99,1	99,19	97,49	86,59	91,74	93,05	90,94	89,84	88,66
10.	Kab. Klaten	99,3	99,24	99,34	99,53	99,58	98,68	93,88	96,29	96,61	91,83	95,81	94,08
11.	Kab. Sukoharjo	99,25	98,18	98,06	99,5	99,69	99,58	97,34	89,08	88,91	97,46	96,81	94,11
12.	Kab. Wonogiri	99,21	98,35	98,74	100	98,93	98,48	91,16	90,17	90,95	90,13	86,92	94,86
13.	Kab. Karanganyar	98,53	99,66	99,24	99,69	99,36	100	88,14	86,8	88,28	90,69	90,17	95,76
14.	Kab. Sragen	99,65	98,62	99,25	98,36	99,61	98,54	87,96	92,93	92,38	89,08	92,79	93,52
15.	Kab. Grobogan	100	99,07	99,09	98,72	98,79	99,01	79,9	92,33	81,44	83,72	79,99	91,26
16.	Kab. Blora	99,25	99,62	99,34	99,34	99,19	99,14	84,93	82,36	82,62	86,86	88,87	88,13
17.	Kab. Rembang	100	98,57	99,25	100	99	98,81	88,27	92,59	92,52	88,19	84,26	90,04
18.	Kab. Pati	99,64	99,65	99,36	99,37	99,05	100	89,05	86,92	87,23	99,71	90,46	91,53
19.	Kab. Kudus	99,64	98,73	99,33	98,44	99,61	98,78	87,47	92,99	92,32	88,98	91,02	90,04
20.	Kab. Jepara	99,67	99,41	99,22	98,99	99,73	98,82	85,6	86,8	86,65	84,84	79,16	91,55
21.	Kab. Demak	68,23	99,41	99,44	98,1	99,37	98,5	86,43	89,08	89,87	87,59	91,59	91,93
22.	Kab. Semarang	99,26	98,49	98,93	99,68	100	99,81	91,5	92,4	92,48	93,01	94,83	94,16
23.	Kab. Temanggung	99,66	98,86	99,32	99,67	98,92	99,15	86,41	68,57	70,06	79,78	97,65	82,95
24.	Kab. Kendal	98,69	97,03	97,74	98,47	99,22	99,71	86,14	83,53	83,25	86,91	90,15	95,44
25.	Kab. Batang	96,46	99,07	99,2	98,55	99,61	98,71	75,62	78,81	79,16	74,35	81,39	82,88
26.	Kab. Pekalongan	98,92	97,96	97,92	97,62	98,43	97,81	73,26	74,52	74,23	73,33	70,86	76,16
27.	Kab. Pemasang	97,68	99,49	99,27	98,9	99,13	96,57	73,63	72,24	72,43	76,05	79,51	84,29
28.	Kab. Tegal	96,17	98,84	99,21	98,3	98,47	98,23	71,36	77,87	79,31	81,01	80,19	85,86
29.	Kab. Brebes	96,65	97,36	97,77	97,06	97,18	98,97	65,39	69,62	69,56	71,62	73,49	80,21
30.	Kota Magelang	99,07	96,1	97,18	99,48	100	100	98,9	98,21	97,89	97,98	96,77	91,81
31.	Kota Surakarta	100	99,18	98,99	99,51	100	99,55	98,32	88,98	89,58	94	91,67	96,05
32.	Kota Salatiga	100	98,88	98,5	100	98,92	99,52	98,49	96,76	96,53	97,03	97,78	99,11
33.	Kota Semarang	99,98	98,84	99,05	99,35	97,74	98,95	95,45	97,1	97,33	94,53	94,49	96,21
34.	Kota Pekalongan	97,67	98,15	98,54	98,07	98,98	98,87	87,1	84,65	84,03	82,56	84,13	84,35
35.	Kota Tegal	96,4	98,43	98,45	98,78	98,03	96,33	95,25	85,5	84,63	88,49	80,49	85,6
JAWA TENGAH		98,47	98,65	98,77	98,8	98,95	98,62	83,41	83,54	83,71	84,47	85,33	88,39

Sumber: Susenas, BPS Provinsi Jawa Tengah (Data Diolah)

Indikator lain selain Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang dapat digunakan untuk melihat layanan kesehatan adalah dengan angka melek huruf. Angka melek huruf merupakan proporsi seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis latin ataupun huruf yang dikukur dalam persentase.

Tabel 1.5.
Angka Melek Huruf
Di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006 sampai Tahun 2011
(Dalam Persen)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kab. Cilacap	90,1	90,1	90,1	90,28	90,28	91,48
2.	Kab. Banyumas	93,31	93,31	93,91	93,98	93,98	94,06
3.	Kab. Purbalingga	93,01	93,01	93,01	93,02	93,48	93,5
4.	Kab. Banjarnegara	88,24	88,24	88,24	88,43	88,43	88,48
5.	Kab. Kebumen	90,39	90,39	90,39	90,4	90,74	91,53
6.	Kab. Purworejo	88,87	88,87	89,2	89,78	91,51	91,74
7.	Kab. Wonosobo	88,91	88,91	88,91	89,27	90,47	91,16
6.	Kab. Magelang	91,34	91,34	91,34	91,35	91,35	93,29
9.	Kab. Boyolali	85,13	85,96	85,96	85,97	85,97	87,96
10.	Kab. Klaten	86,86	89,28	89,28	89,7	89,9	88,92
11.	Kab. Sukoharjo	87,2	89,75	90,36	90,38	90,69	90,72
12.	Kab. Wonogiri	82,03	82,03	82,03	82,14	82,18	83,5
13.	Kab. Karanganyar	91,96	84,15	94,76	84,96	86,91	88,9
14.	Kab. Sragen	76,35	81,05	81,15	82,26	94,36	84,41
15.	Kab. Grobogan	90,18	90,18	90,18	90,36	90,36	90,41
16.	Kab. Blora	82,36	82,36	82,97	83,19	93,19	85,06
17.	Kab. Rembang	88,18	88,18	88,79	89,43	91,17	91,36
18.	Kab. Pati	86,28	86,28	86,28	86,38	86,42	87,59
19.	Kab. Kudus	91,85	91,85	91,98	92,48	93,71	93,73
20.	Kab. Jepara	87,91	92,62	92,92	93,09	93,09	93,15
21.	Kab. Demak	90,3	90,82	90,82	90,95	91,36	92,53
22.	Kab. Semarang	91,67	93,51	93,51	93,62	93,62	93,67
23.	Kab. Temanggung	95,93	95,93	95,93	95,94	95,94	95,96
24.	Kab. Kendal	88,58	88,93	88,93	88,96	89,15	89,31
25.	Kab. Batang	87,01	87,01	87,62	87,74	88,09	89,9
26.	Kab. Pekalongan	89,39	89,39	89,94	90,6	92,05	92,08
27.	Kab. Pemalang	87,16	87,34	87,34	87,75	90,76	90,79
28.	Kab. Tegal	86,4	88,46	89,09	89,21	89,26	89,47
29.	Kab. Brebes	84,3	84,85	84,85	85,21	86,14	86,15
30.	Kota Magelang	97,08	97,17	97,17	97,25	97,25	97,29
31.	Kota Surakarta	96,58	96,58	96,66	96,67	96,68	96,71
32.	Kota Salatiga	95,21	96,49	96,49	96,5	96,5	96,52
33.	Kota Semarang	95,85	95,94	95,94	96,44	96,44	96,47
34.	Kota Pekalongan	98,37	95,37	95,37	95,48	95,68	95,93
35.	Kota Tegal	94,87	94,87	94,87	94,88	94,88	94,9
	JAWA TENGAH	88,24	88,62	89,24	89,46	89,95	90,34

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (Data Diolah)

Dari data yang ada terlihat, persentase angka melek huruf penduduk di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari persentase angka melek huruf di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 sebesar 88,24% terus meningkat di setiap tahunnya secara bertahap sampai pada tahun 2011 mencapai 90,34%. Peningkatan persentase angka melek huruf di tingkat provinsi Jawa Tengah ini, berbanding lurus dengan pertumbuhan persentase angka melek huruf pada tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini terlihat dari pertumbuhan dari masing-masing kabupaten atau kota di provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan secara bertahap tiap tahun. Namun, pertumbuhan persentase ini belum memenuhi target MDGs sebesar 99,8%, baik pada tingkat Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi belum mampu memenuhi target persentase angka melek huruf berdasarkan MDGs provinsi Jawa Tengah yang telah ditentukan.

Selain penyediaan layanan pendidikan, indikator lain dalam melihat penyediaan layanan publik adalah penyediaan layanan kesehatan. Indikator ini dilihat melalui besarnya kematian bayi dan angka harapan hidup. Angka kematian bayi ini digunakan untuk berapa jumlah bayi yang dilahirkan hidup pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

Angka kematian bayi enam tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah apabila dilihat secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Terlihat dari tahun 2006 angka harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,03 per 1000 kelahiran hidup kemudian menurun pada tahun 2008 sebesar 9,27 per 1000 kelahiran bayi dan kemudian di tahun berikutnya meningkat lagi sampai pada tahun 2011 sebesar 10,34 per 1000 kelahiran bayi. Meskipun angka kematian bayi di

Provinsi Jawa Tengah sudah memenuhi target MDGs yang ditentukan sebesar 8,5 per 1000 kematian bayi. Namun, dengan kondisi yang fluktuatif seperti ini dikhawatirkan justru cenderung meningkat di tiap tahun berikutnya.

Tabel 1.6.
Angka Kematian Bayi
Di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006 sampai Tahun 2011
(Dalam Jiwa)

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kab. Cilacap	247	392	383	314	285	275
2.	Kab. Banyumas	283	270	230	225	195	279
3.	Kab. Purbalingga	98	186	128	168	171	168
4.	Kab. Banjarnegara	179	663	291	319	252	255
5.	Kab. Kebumen	83	100	142	191	231	187
6.	Kab. Purworejo	94	62	88	115	86	152
7.	Kab. Wonosobo	200	141	224	219	186	176
6.	Kab. Magelang	128	100	141	131	150	142
9.	Kab. Boyolali	164	217	203	142	164	190
10.	Kab. Klaten	296	253	185	266	283	172
11.	Kab. Sukoharjo	10	46	48	141	138	128
12.	Kab. Wonogiri	49	131	173	138	169	134
13.	Kab. Karanganyar	25	133	110	106	125	121
14.	Kab. Sragen	143	142	138	138	123	137
15.	Kab. Grobogan	204	329	228	258	267	194
16.	Kab. Blora	39	25	156	147	156	169
17.	Kab. Rembang	178	178	161	154	214	198
18.	Kab. Pati	159	392	151	111	186	178
19.	Kab. Kudus	87	173	77	91	97	102
20.	Kab. Jepara	76	244	176	177	178	211
21.	Kab. Demak	39	145	122	102	115	142
22.	Kab. Semarang	111	177	176	203	171	191
23.	Kab. Temanggung	124	115	119	141	193	209
24.	Kab. Kendal	83	83	85	106	123	191
25.	Kab. Batang	170	210	210	198	213	217
26.	Kab. Pekalongan	77	96	107	141	184	138
27.	Kab. Pemalang	224	170	207	248	233	334
28.	Kab. Tegal	93	78	267	178	154	196
29.	Kab. Brebes	279	169	232	437	312	293
30.	Kota Magelang	4	2	10	10	13	16
31.	Kota Surakarta	67	47	37	59	66	37
32.	Kota Salatiga	31	25	18	26	29	21
33.	Kota Semarang	142	208	204	478	337	314
34.	Kota Pekalongan	41	44	52	34	58	57
35.	Kota Tegal	4	10	11	26	15	30
Jumlah		6.192	5.858	5.291	5.938	5.872	5.954
Angka Kematian (Dilaporkan)		11,03	10,48	9,27	10,25	10,62	10,34

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (Data Diolah)

Selain melihat dari angka kematian bayi yang digunakan untuk melihat layanan publik, indikator lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat angka harapan hidup. Angka Harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang akan

dijalani oleh penduduk dari lahir sampai pada tahun dimana penduduk tersebut meninggal dunia.

Tabel 1.7.
Angka Harapan Hidup
Di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006 sampai Tahun 2011
(Dalam Tahun)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun.					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kab. Cilacap	69,6	69,86	70,2	70,51	70,82	71,12
2.	Kab. Banyumas	69,5	69,52	69,61	69,67	69,72	69,78
3.	Kab. Purbalingga	69,2	69,4	69,69	69,94	70,19	70,44
4.	Kab. Banjarnegara	68,4	68,51	68,72	68,88	69,04	69,2
5.	Kab. Kebumen	69,1	69,11	69,21	69,26	69,32	69,37
6.	Kab. Purworejo	69,5	69,71	70,01	70,27	70,52	70,78
7.	Kab. Wonosobo	69	69,2	69,49	69,74	69,98	70,23
6.	Kab. Magelang	69,9	69,9	70,01	70,07	70,12	70,18
9.	Kab. Boyolali	70,1	70,11	70,24	70,3	70,37	70,43
10.	Kab. Klaten	70,8	70,93	71,15	71,33	71,5	71,67
11.	Kab. Sukoharjo	70	70,04	70,11	70,17	70,23	70,29
12.	Kab. Wonogiri	72	72,04	72,14	72,21	72,28	72,35
13.	Kab. Karanganyar	71,9	71,92	72,05	72,13	72,2	72,28
14.	Kab. Sragen	71,8	71,94	72,18	72,37	72,56	72,75
15.	Kab. Grobogan	69,1	69,21	69,42	69,57	69,73	69,89
16.	Kab. Blora	71	71,01	71,13	71,2	71,34	71,41
17.	Kab. Rembang	69,7	69,75	69,91	70,02	70,13	70,23
18.	Kab. Pati	72,6	72,62	72,72	72,77	72,83	72,89
19.	Kab. Kudus	69,4	69,41	69,51	69,57	69,62	69,68
20.	Kab. Jepara	70,3	70,39	70,58	70,71	70,85	70,99
21.	Kab. Demak	70	70,31	70,69	71,04	71,24	71,59
22.	Kab. Semarang	72,2	72,21	72,33	72,4	72,47	72,54
23.	Kab. Temanggung	72,1	72,16	72,32	72,43	72,54	72,66
24.	Kab. Kendal	67,1	69,4	67,77	68,1	68,44	68,77
25.	Kab. Batang	69,2	69,38	69,66	69,88	70,11	70,34
26.	Kab. Pekalongan	67,9	68,13	68,45	68,73	69,01	69,28
27.	Kab. Pemalang	66,8	66,97	67,42	67,46	67,68	67,9
28.	Kab. Tegal	67,6	67,86	68,19	68,49	68,79	69,08
29.	Kab. Brebes	66,5	66,75	67,08	67,37	67,67	67,96
30.	Kota Magelang	70	70,01	70,11	70,17	70,22	70,28
31.	Kota Surakarta	71,8	71,84	71,96	72,07	72,16	72,25
32.	Kota Salatiga	70,6	70,66	7,82	70,92	71,03	71,14
33.	Kota Semarang	71,9	71,9	72,01	72,07	72,13	72,18
34.	Kota Pekalongan	69,7	69,8	70,01	70,16	70,32	70,48
35.	Kota Tegal	68	68,14	68,37	68,56	68,74	68,93
	JAWA TENGAH	70,8	70,9	71,1	71,25	71,40	71,55

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (Data Diolah)

Angka harapan hidup pada tingkat provinsi di Jawa Tengah tiap tahunnya mengalami peningkatan secara bertahap. Terlihat angka harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 sebesar 70,8 tahun kemudian mengalami

peningkatan di setiap tahunnya sampai terakhir pada tahun 2011 mencapai sebesar 71,55 tahun. Peningkatan secara bertahap ini juga berbanding lurus dengan angka harapan hidup di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari peningkatan angka harapan hidup pada masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah apabila dilihat secara detail. Namun, peningkatan harapan hidup pada tingkat provinsi ini belum memenuhi target MDGs provinsi Jawa Tengah sebesar 71,14%. Pada tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah hanya beberapa kota yang sudah memenuhi target MDGs, sedangkan yang lainnya belum memenuhi.

Dari masalah dan data tersebut, maka untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal berdampak pada peningkatan kinerja dan efisiensi sektor publik selama enam tahun terakhir penyelenggaraannya di Jawa Tengah perlu dilakukan pengukuran kinerja dan efisiensi sektor publik dengan indikator yang relevan. Indikator tersebut meliputi tujuan pembangunan sesuai dengan MDGs. Tujuan MDGs tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Kemudian untuk mengetahui Kabupaten/Kota yang relatif efisien atau relatif tidak efisien sektor publik di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah maka dilakukan analisis efisiensi relatif antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Peningkatan jumlah pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah juga berpengaruh terhadap kondisi makro ekonomi. Dalam melihat kondisi makro ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, indikator yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB riil di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.8.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan
di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006 sampai Tahun 2011
(Dalam Persen)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kab. Cilacap	5,00	4,87	4,92	5,25	5,65	5,78
2	Kab. Banyumas	4,84	5,30	5,38	5,49	5,77	5,86
3	Kab. Purbalingga	5,06	6,19	5,30	5,89	5,67	6,07
4	Kab. Banjarnegara	4,35	5,01	4,98	5,11	4,89	4,92
5	Kab. Kebumen	4,08	4,52	5,80	4,02	4,15	4,88
6	Kab. Purworejo	5,23	6,08	5,62	4,96	5,01	5,02
7	Kab. Wonosobo	3,23	3,58	3,69	4,02	4,29	4,52
6	Kab. Magelang	4,91	5,21	4,99	4,72	4,51	4,27
9	Kab. Boyolali	4,19	4,08	4,04	5,16	3,60	5,28
10	Kab. Klaten	2,30	3,31	3,93	4,24	1,73	1,96
11	Kab. Sukoharjo	4,53	5,11	4,84	4,76	4,65	4,59
12	Kab. Wonogiri	4,07	5,97	4,27	4,73	5,87	2,03
13	Kab. Karanganyar	5,08	5,74	5,30	5,54	5,42	5,50
14	Kab. Sragen	5,18	5,73	5,69	6,01	6,09	6,53
15	Kab. Grobogan	4,00	4,37	5,33	5,03	5,05	3,59
16	Kab. Blora	3,85	3,95	5,62	5,08	5,19	2,59
17	Kab. Rembang	5,53	3,81	4,67	4,46	4,45	4,40
18	Kab. Pati	4,45	5,19	4,94	4,69	5,11	5,43
19	Kab. Kudus	2,46	3,33	3,92	4,95	4,17	4,21
20	Kab. Jepara	4,19	4,74	4,49	5,02	4,52	5,49
21	Kab. Demak	4,02	4,15	4,11	4,08	4,12	4,48
22	Kab. Semarang	3,81	4,72	4,26	4,37	4,90	5,69
23	Kab. Temanggung	3,31	4,03	3,54	4,09	4,31	4,65
24	Kab. Kendal	3,67	4,28	4,26	5,55	5,97	5,99
25	Kab. Batang	2,51	3,49	3,67	3,72	4,97	5,26
26	Kab. Pekalongan	4,21	4,59	4,78	4,30	4,27	4,77
27	Kab. Pemasang	3,72	4,47	4,99	4,78	4,94	4,83
28	Kab. Tegal	5,19	5,51	5,32	5,29	4,48	4,81
29	Kab. Brebes	4,71	4,79	4,81	4,99	4,94	4,97
30	Kota Magelang	2,44	5,17	5,05	5,11	6,12	5,48
31	Kota Surakarta	5,43	5,82	5,69	5,90	5,94	6,04
32	Kota Salatiga	4,17	5,39	4,98	4,48	5,01	5,52
33	Kota Semarang	5,71	5,98	5,59	5,34	5,87	6,41
34	Kota Pekalongan	3,06	3,80	3,37	4,78	5,51	5,45
35	Kota Tegal	5,15	5,21	5,15	5,02	4,61	4,58
	Rata - rata	4,21	4,76	4,79	4,85	4,92	4,91

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (Data Diolah)

Pertumbuhan PDRB rill Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tiap tahun mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan PDRB rill dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat di tiap tahunnya. Namun, dari rata-rata pertumbuhan PDRB rill

yang terus meningkat tersebut apabila dilihat dari tiap daerah Kabupaten/Kota mengalami pertumbuhan PDRB riil yang bervariasi. Seperti pada tahun 2006 daerah yang memiliki pertumbuhan PDRB riil yang tinggi adalah Kota Semarang dengan 5,71% sedangkan daerah yang pertumbuhan PDRB riil yang rendah adalah Kabupaten Klaten dengan 2,30% padahal rata-rata pertumbuhan PDRB riil di Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,21%. Pertumbuhan antar daerah yang memiliki angka perbedaan yang tinggi ini setiap tahun terus berubah di tiap daerahnya. Sampai terakhir data yang ada di tahun 2011 dengan pertumbuhan rata-rata PDRB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sebesar 4,91%, pertumbuhan PDRB riil yang tinggi adalah Kabupaten Sragen dengan 6,53% dan pertumbuhan PDRB riil yang rendah adalah Kabupaten Klaten dengan 1,96%. Namun, pertumbuhan PDRB riil yang meningkat di tiap tahunnya ini sebenarnya belum mampu mencapai target sebesar 6,2% baik di tingkat Jawa Tengah maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Pertumbuhan PDRB riil yang meningkat ini serupa dengan jumlah penerimaan pajak daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang juga mengalami peningkatan di tiap tahunnya.

Tabel 1.9.
Jumlah Penerimaan Pajak Daerah
di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006 sampai Tahun 2011
(Dalam Ribu)

No	Kabupaten / Kota	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kab. Cilacap	32.072.943	32.841.910	41.103.678	44.266.569	46.309.940	46.103.799
2.	Kab. Banyumas	16.832.560	18.990.998	21.342.097	23.497.798	29.101.072	27.664.145
3.	Kab. Purbalingga	6.995.119	8.153.289	9.574.697	10.934.150	11.371.153	17.131.721
4.	Kab. Banjarnegara	6.538.706	6.810.610	7.314.771	8.161.471	9.799.726	9.221.000
5.	Kab. Kebumen	7.694.152	8.713.201	10.983.958	10.964.523	12.765.696	13.634.000
6.	Kab. Purworejo	4.732.823	6.224.341	6.402.461	6.818.626	13.671.213	8.307.740
7.	Kab. Wonosobo	4.728.120	5.192.089	5.886.039	5.685.183	6.736.137	5.650.500
6.	Kab. Magelang	16.181.110	20.164.064	25.207.008	21.981.355	22.350.589	27.683.357
9.	Kab. Boyolali	9.442.747	10.619.320	11.155.036	12.896.540	14.094.132	13.529.790
10.	Kab. Klaten	10.310.593	12.689.833	18.026.871	18.921.063	19.549.880	22.365.000
11.	Kab. Sukoharjo	13.555.956	14.532.968	15.421.729	18.003.313	21.688.464	22.332.244
12.	Kab. Wonogiri	6.417.830	7.257.949	8.055.007	8.669.381	9.599.208	7.920.500
13.	Kab. Karanganyar	14.543.183	19.053.559	21.874.872	21.644.561	23.588.206	24.150.000
14.	Kab. Sragen	8.859.373	10.454.240	11.958.348	16.248.229	17.659.091	16.750.383
15.	Kab. Grobogan	9.387.115	9.431.471	9.161.707	11.177.230	15.104.907	11.847.700
16.	Kab. Blora	5.613.868	6.372.371	7.008.512	8.116.957	8.967.500	10.091.960
17.	Kab. Rembang	5.342.910	6.174.552	7.622.039	9.859.879	13.358.019	13.255.000
18.	Kab. Pati	10.462.632	12.121.193	12.569.740	14.590.186	17.694.790	20.840.852
19.	Kab. Kudus	13.045.214	14.523.986	15.745.884	19.592.884	21.681.680	24.142.991
20.	Kab. Jepara	11.931.316	13.084.433	13.941.163	16.024.843	18.702.756	18.131.647
21.	Kab. Demak	8.008.267	7.696.473	9.959.585	13.058.548	13.472.717	16.450.048
22.	Kab. Semarang	15.020.514	15.895.418	17.943.901	20.439.129	26.228.586	28.441.363
23.	Kab. Temanggung	4.792.942	5.312.688	5.819.500	6.194.994	7.389.440	6.903.321
24.	Kab. Kendal	17.052.569	18.750.594	19.835.902	19.575.799	23.671.771	19.455.150
25.	Kab. Batang	7.093.483	7.833.316	9.112.037	9.102.024	10.055.788	12.226.296
26.	Kab. Pekalongan	7.783.349	8.604.584	9.522.187	10.193.310	10.686.458	11.369.172
27.	Kab. Pemalang	8.144.117	9.292.781	10.324.671	11.782.513	12.969.956	12.357.894
28.	Kab. Tegal	11.788.318	12.674.642	13.210.710	14.045.893	14.464.435	17.746.692
29.	Kab. Brebes	10.706.108	12.272.083	14.630.524	15.405.411	16.180.865	17.110.000
30.	Kota Magelang	4.411.072	5.052.455	5.423.120	5.969.582	6.717.893	6.291.020
31.	Kota Surakarta	35.589.767	41.404.082	46.855.622	52.163.819	58.841.623	60.414.575
32.	Kota Salatiga	6.514.964	7.065.861	7.995.573	8.243.033	9.206.459	8.428.539
33.	Kota Semarang	114.570.396	128.535.918	143.460.195	154.505.287	177.680.373	275.562.250
34.	Kota Pekalongan	8.396.545	9.156.598	10.175.094	11.070.205	12.349.959	12.712.208
35.	Kota Tegal	8.134.226	9.131.410	10.694.367	11.910.295	13.100.646	13.262.912
	JAWA TENGAH	482.694.907	552.085.224	615.319.205	671.714.583	866.811.000	876.569.566

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (Data Diolah)

Jumlah penerimaan pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, jumlah penerimaan pajak di Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada tingkat provinsi sebesar 482,69 miliar rupiah yang kemudian meningkat tiap tahunnya sampai terakhir data menunjukkan pada tahun 2011 jumlah penerimaan pajak di Kabupaten/Kota Jawa Tengah sebesar

876,57 miliar rupiah. Namun, jumlah penerimaan pajak tingkat provinsi di Jawa Tengah yang meningkat seperti ini, jika dilihat pada tingkat Kabupaten/Kota mengalami pertumbuhan yang bervariasi. Maksudnya adalah tidak semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang meningkat. Akan tetapi, ada beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan pada jumlah penerimaan pajaknya di tahun tertentu. Perbedaan proporsi jumlah penerimaan pajak yang sangat tinggi juga terjadi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Terlihat bahwa Kota Semarang dan Kota Surakarta mempunyai pendapatan pajak daerah yang jauh lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan menciptakan perekonomian yang tidak stabil dan kesenjangan antar daerah yang tinggi.

Perbedaan pertumbuhan PDRB riil dan pendapatan pajak antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain: perbedaan kepemilikan sumber daya alam, letak geografis dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Sumber daya alam di setiap daerah yang bervariasi berdampak terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan wilayah yang bervariasi. Selain ketiga faktor tersebut terdapat indikator lain yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara seperti: sumber daya manusia, teknologi, dan modal.

Kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pajak daerah yang cenderung terus meningkat di Provinsi Jawa Tengah belum mampu menyerap pengangguran yang cukup besar di tiap tahunnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.10.
Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006 sampai Tahun 2011
(Dalam Persen)

No.	Tahun	Jumlah Pengangguran Terbuka (ribu jiwa)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1.	2006	1.356.909	7,30
2.	2007	1.360.219	7,70
3.	2008	1.227.308	7,35
4.	2009	1.252.267	7,33
5.	2010	1.046.883	6,21
6.	2011	1.002.662	5,93

Sumber: Sakernas, BPS Provinsi Jawa Tengah (Data Diolah)

Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah yang fluktuatif. Terlihat pada tahun 2007 mengalami peningkatan jumlah dan tingkat pengangguran terbuka yaitu dari 1.356.909 juta jiwa di tahun 2006 menjadi 1.360.219 juta jiwa dan 7,30% menjadi 7,70%. Kemudian tahun setelah itu mengalami penurunan jumlah dan tingkat pengangguran terbuka hingga tahun 2011 mencapai jumlah 1.002.662 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbukanya sebesar 5,93%. Kondisi seperti ini dikawatirkan dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang imbasnya secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Padahal dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan produksi domestik daerah yang nantinya mampu meningkatkan pendapatan daerah dan pajak daerah sehingga perekonomian di provinsi Jawa Tengah dapat tumbuh. Sehingga diperlukan laju pertumbuhan PDRB riil yang lebih besar lagi untuk mendorong kinerja ekonomi makro daerah.

Dalam penelitiannya Hadi Sasana (2006) meneliti tentang pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2002 sampai 2005. Penelitian tersebut melihat dampak langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen dan endogen tersebut meliputi desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Ternyata dalam penelitian tersebut disimpulkan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sugeng Utomo dan Sumarsono (2009) dalam penelitiannya juga membahas tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus di Jawa Timur. Dalam penelitian ini melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi pembelanjaan anggaran pemerintah daerah. Pembelanjaan anggaran pemerintah tersebut dilihat dari sisi belanja APBD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah desentralisasi Fiskal dilihat aspek pembelanjaan di Jawa Timur berpengaruh positif-signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat kedua penelitian terdahulu dalam penelitian ini juga akan membahas bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah setelah satu dekade lebih desentralisasi fiskal diterapkan di Indonesia.

Sehingga dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua bahasan yaitu dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi sektor publik dan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana keduanya mengambil studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul tentang “**Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi**

Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah belum signifikannya penyediaan layanan publik pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga target MDGs belum mampu terpenuhi. Hal ini terlihat dari indikator-indikator dasar seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada SD maupun SMP, Angka Melek Huruf, Angka Kematian Bayi, dan Angka Harapan Hidup. Dalam indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah, Angka Melek Huruf, dan Angka Harapan Hidup belum mampu memenuhi target MDGs provinsi Jawa Tengah yang ditentukan. Sedangkan pada indikator Angka Partisipasi Sekolah SD dan Angka Kematian Bayi sudah memenuhi target indikator MDGs provinsi Jawa Tengah. Namun, dalam pertumbuhannya mengalami fluktuatif sehingga terkesan rawan.

Pada kondisi perekonomian, pertumbuhan PDRB riil dan jumlah penerimaan pajak daerah yang meningkat tiap tahunnya belum mampu mengurangi pengangguran yang cukup besar di tiap tahunnya di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kondisi seperti ini dikawatirkan dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang imbasnya secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Padahal dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja dapat meningkatkan pertumbuhan produksi domestik daerah yang nantinya mampu meningkatkan pendapatan daerah dan pajak daerah sehingga perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dapat tumbuh.

Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi sektor publik pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3.Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka terlihat tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap efisiensi sektor publik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

1.4.Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah serta kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan tentang pembangunan perekonomian, pengembangan daerah. serta melihat pengambilan kebijakan dari sisi efisiensi sektor publik dari sisi bidang pendidikan, kesehatan, dan makro ekonomi.
2. Sebagai sumbangan pemikiran di kemajuan ilmu pengetahuan dengan informasi mengenai konsep pertumbuhan perekonomian serta total kinerja sektor publik dengan *Public Sector Performance (PSP)* dan efisiensi

pengeluaran sektor publik (*Public Sector Efficiency*= PSE). Untuk mengembangkan teori-teori dari ekonomi publik dan otonomi daerah.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika dan struktur penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua akan diuraikan landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya, sehingga timbul adanya hipotesis (dugaan awal penelitian).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga dijelaskan definisi operasional yang mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel-variabel dalam penelitian. Metode analisis mendeskripsikan jenis atau model analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat diuraikan tentang deskripsi objek. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data dianalisis, dalam pembahasan dijelaskan implikasi dari hasil analisis data dan interpretasi yang dibuat dalam penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab lima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Dan saran sebagai masukan pada penelitian mendatang. Saransaran yang diajukan untuk perbaikan pelaksanaan (praktek di lapangan) dan perbaikan penelitian berikutnya berdasarkan penerapan teori yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

Dalam penelitian ini, menganalisis tentang Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi (studi kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Dasar teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah teori mengenai otonomi daerah, desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, teori pengeluaran pemerintah, konsep efisiensi, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal dan efisiensi sektor publik, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Selain dengan dasar teori, penelitian terdahulu juga menjadi acuan dalam pembuatan penelitian ini.

2.1.1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti dalam hal ini daerah otonom baru dapat melaksanakan otonomi daerah apabila mendapatkan pelimpahan atau pemberian wewenang dari pemerintah pusat. Kemudian ada lima landasan otonomi yang dijelaskan oleh Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 yaitu meliputi: demokrasi, partisipasi dan pemberdayaan, persamaan dan keadilan, pengakuan atas potensi daerah dan pembedaannya, dan penguatan parlemen lokal.

Kaloh (2002) mengungkapkan bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Maksudnya adalah otonomi daerah bukan hanya pelimpahan wewenang saja, akan tetapi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kaloh juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan otonomi daerah akan berjalan efektif apabila didukung oleh: Peningkatan Sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan; Adanya partisipasi aktif seluruh masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan; Pemerintah daerah perlu mengembangkan manajemen pemerintahan yang obyektif, rasional, dan modern; dan Perlunya penelitian, tindakan, dan evaluasi, terhadap proses pelaksanaan otonomi daerah berikut peraturan perundang-undangnya.

2.1.2. Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya adalah dengan adanya desentralisasi, pemerintah pusat memberi wewenang dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri.

Kemudian banyak para ahli memberikan definisi mengenai desentralisasi. Salah satunya Zadzuli (2004) yang berpendapat bahwa desentralisasi merupakan salah satu kebijakan dengan menyerahkan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah yang lebih atas kepada daerah bawahan untuk mengurus rumah

tangganya sendiri dimana akan melahirkan otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah menuntut daerah otonom untuk lebih mandiri dan memahami daerah pemerintahannya.

Dari definisi diatas dapat terlihat perbedaan antara desentralisasi dengan otonomi. Perbedaannya adalah jika otonomi berarti adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau suatu bagian wilayah dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara, maka desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah.

2.1.3. Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori pengeluaran pemerintah yang diungkapkan oleh Wagner dalam Mangkusobroto (1998) mengenai pengeluaran pemerintah yang semakin membesar terhadap GNP. Wanger menerangkan bagaimana peran pemerintah dalam mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi dan sebagainya. Kemudian hukum Wanger itu diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_kPP_1}{PPK_1} < \frac{P_kPP_2}{PP_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n}$$

Keterangan:

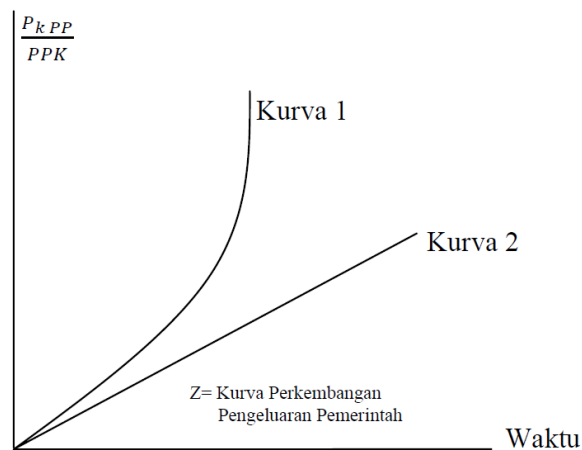
PkPP = Pengeluaran pemerintah per kapita

PKK = Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...n = jangka waktu (tahun)

Dalam hukum Wanger ini juga disajikan dalam diagram yang menggambarkan kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk yang eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1.

Gambar 2.1.
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wanger



Sumber: Mangkusoebroto (1998)

2.1.4. Konsep Efisiensi

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran. Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang atau jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi atau perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Dengan kata lain efisiensi disini membandingkan antara berapa besar rupiah yang dibelanjakan pemerintah untuk menyediakan barang atau jasa publik dengan manfaat yang diberikan bagi masyarakat dengan belanja barang atau jasa publik itu sendiri.

2.1.5. Efisiensi Sektor Publik

Dalam penyediaan layanan publik perlu adanya efisiensi. Maksud dari efisiensi layanan publik tersebut adalah bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini adalah keuangan daerah secara akurat dan optimal, untuk kemudian menghasilkan sejumlah output atau layanan publik. Menurut pendapat Antony dan Herzlinger (2004) menyatakan bahwa sektor publik disediakan dengan tujuan untuk menghasilkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kinerja sektor publik sendiri dilihat dengan tolak ukur berapa banyak pelayanan yang diberikan dan disediakan untuk masyarakat serta bagaimana kualitas dari pelayanan yang disediakan.

2.1.6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikator penting yang digunakan untuk menganalisis mengenai pembangunan suatu negara. Melalui pertumbuhan ekonomi ini dapat terlihat bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara berkembang atau tidak. Pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki pengertian yang berbeda dari para ahli. Bahkan tiap daerah atau negara mempunyai sudut pandang yang berbeda mengenai sebuah pertumbuhan ekonomi.

Menurut Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam bukunya juga menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu proses, output per kapita, dan prespektif jangka panjang. Lebih lanjut lagi Boediono (1999) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Maksudnya adalah perekonomian dapat

berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan kenaikan output per kapita. Output per kapita adalah output total yang dibagi dengan jumlah penduduk. Ada dua sisi hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan output per kapita yaitu dari sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Aspek yang terakhir adalah aspek prospektif jangka panjang. Aspek ini mempunyai anggapan bahwa suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama output per kapita mengalami kenaikan. Sehingga teori ini mendefinisikan teori pertumbuhan ekonomi untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat saling mempengaruhi.

Arsyad (1997) memberikan suatu definisi yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Kemudian dia berpendapat bahwa terdapat empat peran yang diambil pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator yang berfungsi untuk melahirkan inisiatif-inisiatif pembangunan daerah.

Menurut ilmu ekonomi makro salah satu komponen yang dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah melalui pajak. Pajak dapat meningkatkan karena dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan pemerintah melalui pungutan pajak. Jika pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak ini digunakan untuk pengeluaran yang menyangkut komponen pengeluaran pemerintah atau G , maka peningkatan pungutan pajak dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai G ,

dimana G berkorelasi positif terhadap GDP. Maka dari itu setiap peningkatan pajak secara tidak langsung dapat meningkatkan GDP.

2.1.7. Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi Sektor Publik

Desentralisasi fiskal mempunyai tujuan selain untuk mengembangkan pemerintah daerah sesuai dengan ciri dan karakteristiknya, juga mempunyai tujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Sehingga apabila terjalin hubungan baik antara pemerintah daerah dan rakyatnya maka pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah mampu memahami kebutuhan rakyatnya. Sehingga dalam pelayanannya, pemerintah daerah mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka penyediaan barang dan layanan publik. Efisiensi penyediaan layanan publik juga dijelaskan oleh seorang ekonom bernama Paul A. Samuelson. Pada teorinya yang bernama *Samuelson condition*, menjelaskan mengenai penyediaan barang publik pada masyarakat. Dalam teori Samuelson dapat digambarkan bahwa tiap daerah otonom memiliki wewenang dalam penyediaan barang publik dikarenakan pemerintah daerah lebih mengerti daerah pemerintahannya. Fungsi pemerintah sebagai pengatur otonomi daerah adalah memberikan sejumlah dana kepada pemerintah daerah untuk digunakan belanja publik. Dengan diberikannya dana belanja publik dari pusat kepada pemerintah daerah dapat dilihat pemerintah daerah mana yang dapat membelanjakan sektor publik yang efisien maupun tidak efisien. Setelah itu pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan daerah yang membelanjakan sektor publik yang efisien untuk membantu daerah yang belanja publiknya kurang efisien.

2.1.8. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerah otonomnya. Kewenangan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah meliputi kewenangan dalam peneglola pajak dan pendapatan daerah. Kewenangan lainnya adalah dalam menentukan anggaran dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pengalokasian tersebut dapat berupa pembiayaan pelayanan publik yang juga menjadi tugas pemerintah daerah. Apabila pelayanan publik baik maka dapat mempengaruhi pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah juga dibahas dalam studi Sasana (2009) di Jawa Tengah. Dalam studinya menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dan kesempatan kerja. Desentraisasi di Jawa Tengah lebih efektif dan efisien apabila didukung kebijakan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, seperti: pertanian, UMKM, penyediaan sarana dan prasarana publik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi sektor publik dan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa diantaranya terdapat pada tabel penelitian sebagai berikut:

No.	Peneliti	Tujuan	Metode	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sugeng Hadi Utomo dan Hadi Sumarsono (2009)	<ul style="list-style-type: none"> Meneliti apakah desentralisasi fiskal (dalam aspek pembelanjaan) berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meneliti desentralisasi fiskal berdampak positif apakah efisiensi pembelanjaan. Meneliti desentralisasi fiskal berdampak positif apakah terhadap pertumbuhan ekonomi? 	<p>Menggunakan Ekonometrika dengan regresi dengan menggunakan formula:</p> $PE_i = \zeta_1 DF_i + \zeta_2 ESP_i + e \dots\dots\dots (1)$ $ESP_i = \zeta_1 DF_i + e \dots\dots\dots (2)$ <ul style="list-style-type: none"> PE : Pertumbuhan Ekonomi DFi : Dana Desentralisasi DF1 : Rasio Belanja Total pemerintah daerah terhadap total belanja pusat. ESPi : Efisiensi Sektor Publik ESP : Rasio belanja tak terduga terhadap APBD 	<p>Variabel yang digunakan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Ekonomi Dana Desentralisasi Rasio Belanja Total pemerintah daerah terhadap total belanja pusat. Efisiensi Sektor Publik Rasio belanja tak terduga terhadap APBD. 	<ul style="list-style-type: none"> Desentralisasi Fiskal aspek pembelanjaan di Jawa Timur berpengaruh positif-signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi pembelanjaan berpengaruh positif signifikan terhadap inefisiensi sektor publik yang diproksi dengan proporsi pengeluaran tidak terduga terhadap APBD. Inefisiensi sektor publik di Jawa Timur berpengaruh negatif-signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.	Akhamad Syakir Kurnia (2006)	Menghitung efisiensi dari kinerja sektor publik (PSP) dan efisiensi sektor publik (PSE) yang dikompositkan dalam 5 sub	Pendekatan Non parametric: Free Disposable Hull dan Data Envelopment Analysis	Indikator Sosio-Ekonomi terdiri dari indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator. Indikator Musgravian terdiri dari distribusi,	<ul style="list-style-type: none"> PSP indicator terlihat bahwa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki porsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB tinggi tidak serta merta

		indikator di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah		dan distribusi ekonomi	memiliki angka indikator yang tinggi. <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan efisiensi dengan alokasi pengeluaran tidak berkorelasi terlihat dari penggunaan PSP maupun FDH kabupaten/kota yang proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB tidak selalu efisien dibanding kabupaten/kota lainnya.
3.	Hadi Sasana (2006)	Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.	Menggunakan Ekonometrika dengan regresi dengan variabel yang dibakukan menggunakan formula: $Y1 = \beta X1 + \mu 1$ <ul style="list-style-type: none"> X1 = desentralisasi Fiskal Y1 = Pertumbuhan Ekonomi μ = disturbance term 	Variabel yang digunakan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Desentralisasi Fiskal (X1) Pertumbuhan Ekonomi (Y1) 	Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
4.	Kartini Sihombing (2008)	Menganalisis Pengaruh Aglomerasi, Modal, Tenaga Kerja dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan	Menggunakan Ekonometrika dengan regresi dengan variabel yang dibakukan menggunakan formula: $LPDRB = \beta_0 + \beta_1 LAGLO_t + \beta_2 LKAP_t + \beta_4 LKDt + E_t$	Variabel yang digunakan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Aglomerasi (X1) Modal (X2) Tenaga Kerja (X3) Kepadatan Penduduk (X4) Pertumbuhan 	Hubungan positif antara variabel aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak meskipun hasilnya tidak signifikan. Variabel tenaga kerja

		Ekonom di Kabupaten Demak	<ul style="list-style-type: none"> • LAGLO = Aglomerasi • LKAP = Tenaga Kerja • LKD = Kepadatan Penduduk 	Ekonomai (Y1)	tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak, tetapi variabel modal secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak.
4.	Antonio Afonso, L Schuknecht, dan Vito Tanzi (2005)	Menghitung efisiensi dari kinerja sektor publik (PSP) dan efisiensi sektor publik (PSE) yang dikompositkan dalam 7 dengan sub indikator di 23 negara industry.	Pendekatan Non parametric: Free Disposable Hull dan Data Envelopment Analysis	<ul style="list-style-type: none"> • Opportunity indikator terdiri dari administrasi, indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator infrastruktur publik • Indikator Musgravian terdiri dari distribusi, stabilitas, dan kinerja ekonomi negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Negara dengan sektor publik yang kecil nilai tinggi pada kinerja indikator administrasi dan kinerja ekonomi, sedangkan negara dengan sektor publik yang besar mempunyai distribusi pendapatan yang merata. • Negara yang sektor publik yang kecil menunjukkan signifikansi indikator PSE yang lebih tinggi daripada sektor public yang dikatakan besar, sehingga berlaku diminishing marginal products of higher publik spending

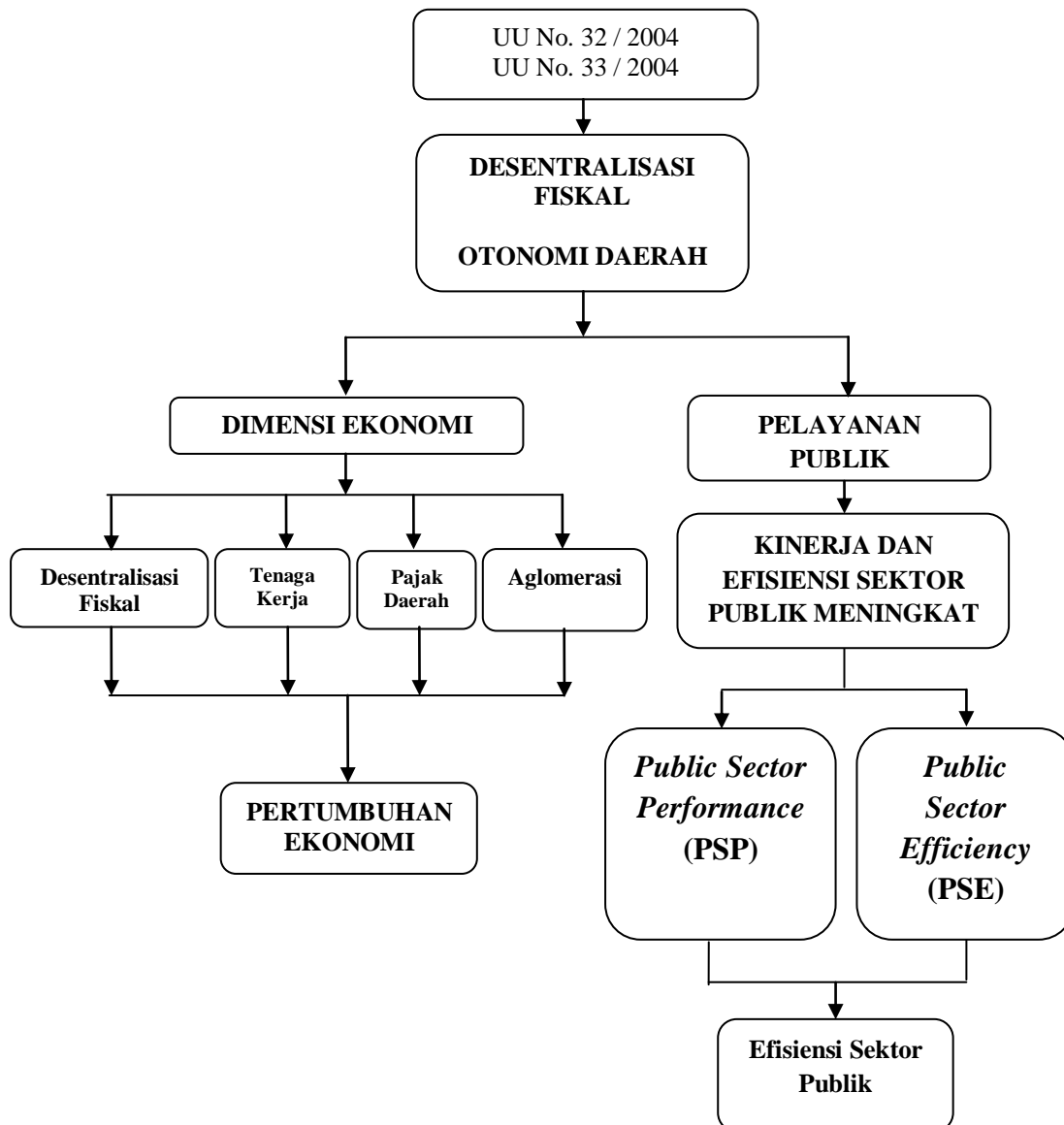
2.3.Kerangka Pemikiran

Dengan dibentuknya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang perimbangan wewenang dan perimbangan otoritas keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Melahirkan suatu kebijakan yang dinamakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Diberlakukannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah ini mempengaruhi dua hal penting dalam pemerintahan yaitu dimensi ekonomi dan pelayanan publik.

Dari segi dimensi ekonomi desentralisasi fiskal mempengaruhi proses pembagian kekuasaan di setiap daerah itu sendiri, bagaimana tenaga kerja di daerah, pajak daerah, dan output yang dihasilkan daerah otonom. Pertumbuhan ekonomi menurut Teori Harrod-Domar sebagai faktor yang dipengaruhi oleh adanya desentralisasi fiskal. Pengaruh tersebut terjadi secara tidak langsung yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian yang dilandasi teori Oates.

Dari segi pelayanan publik, dengan adanya desentralisasi fiskal juga terpengaruh. Kemudian peran pemerintah yaitu Distribusi, Alokasi, dan Stabilisasi penyediaan barang publik yang membuat kinerja dan efisiensi sektor publik dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan MDGs. Pengaruh ini mendasar pada teori Peterson, Smoke, dan Bahl dimana inti dari kedua teori itu adalah pemerintah berfungsi sebagai penyedia sarana dan layanan publik bagi masyarakat.

Kerangka pemikiranteoritis penelitian ini, disajikan sebagai berikut:



2.4.Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara, tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan. Artinya hipotesis dapat diubah, diganti dengan hipotesis lain yang yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang diperoleh tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep yang digunakan. Maka hipotesis untuk penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi:

Hipotesis 1: diduga ada pengaruh yang positif dari derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hipotesis 2: diduga ada pengaruh yang positif dari pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hipotesis 3: diduga ada pengaruh yang positif dari tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hipotesis 4: diduga ada pengaruh yang positif dari aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

1.1.1. Variabel Penelitian

Variabel merupakan objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa dan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi sektor publik dan kedua, mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi sector publik dan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Variabel dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi sector publik

Penelitian ini menggunakan enam sub indikator kinerja publik, yaitu meliputi: kesehatan, pendidikan, kemiskinan, distribusi, stabilitas, dan kinerja publik. Enam indikator tersebut terdiri dari empat indikator yang merupakan indikator dalam MDGs dan tiga indikator lainnya merupakan indikator kinerja Musgravian.

Sub indikator kesehatan terdapat tiga jenis indikator, yaitu: angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan.

Sub indikator pendidikan terdapat tiga jenis indikator meliputi: angka

partisipasi SD, angka partisipasi SMP, angka melek huruf. Sub indikator kemiskinan terdapat satu komponen yaitu proporsi penduduk miskin. Sub indikator distribusi terdapat satu indikator yaitu gini ratio. Sub indikator stabilitas terdapat dua indikator yaitu variasi laju pertumbuhan PDRB dan laju inflasi. Sub indikator kinerja ekonomi terdapat tiga indikator yaitu laju pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka.

2. Variabel dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.
 - Variabel terikat (dependent variabel) dalam penelitian dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi ini adalah pertumbuhan ekonomi.
 - Variabel bebas (independent variabel) dalam penelitian dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi meliputi: Desentralisasi fiskal, Tenaga kerja, Pajak Daerah, dan Aglomerasi.

1.1.2. Defenisi Operasional

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi sektor publik adalah sebagai berikut :

- Angka Harapan Hidup

Angka Harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh penduduk dari lahir sampai pada tahun dimana penduduk tersebut meninggal dunia. Angka harapan hidup di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan kesehatan. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

- Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan jumlah bayi yang dilahirkan hidup pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Angka tersebut dilihat dari per 1000 kelahiran hidup. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah jiwa.

- Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu melahirkan merupakan jumlah ibu melahirkan meninggal pada tahun tertentu dan indikator ini digunakan untuk melihat angka derajat kesehatan perempuan. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

- Angka Partisipasi SD

Rasio jumlah siswa SD, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan dasar terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut (7-12 tahun). Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

- Angka Partisipasi SMP

Rasio jumlah siswa SMP, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan menengah terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut (13-15 tahun). Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

- Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis latin ataupun huruf yang lainnya. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

- Rata-rata Lama Sekolah

Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulangdengn melihat dari: partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah tahun.

- Proporsi Jumlah Penduduk Miskin

Persentase jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Indeks ini digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

- Indeks Gini

Indeks yang digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau total individu dengan total pendapatan. Indeks gini mrmpunyai ukuran 0 sampai dengan 1. Bila mendekati 0 menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Biasanya indek ini didasarkan pada kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran

kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah indeks.

- PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB suatu daerah pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Tingkat Pengangguran Terbuka. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah rupiah.

- Laju Pertumbuhan PDRB

Rasio antara PDRB tahun tertentu dijumlah dengan PDRB tahun sebelumnya dibagi dengan PDRB tahun sebelumnya kemudian dikali seratus persen. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

- Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbandingan antara jumlah penduduk yang masuk dalam golongan pengangguran terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat pendudukan ini disajikan dalam bentuk persentase yang mana kegunaan dari indikator ini adalah untuk melihat tingkat penggunaan angkatan kerja suatu wilayah atau daerah. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah segala kegiatan perekonomian yang termasuk didalamnya adalah produksi barang dan jasa yang dihasilkan

masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini juga digunakan untuk menjelaskan atau mengukur prestasi perkembangan perekonomian suatu wilayah. Toldaro (2006) menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan hasil atau output yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dari PDRB per kapita daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan PDRB pendekatan produksi atas dasar harga konstan tahun 2000. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

- Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dalam penelitian ini dengan mengukur derajat tingkat desentralisasi fiskalnya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan penerimaan dengan mengukur Pendapatan Asli Daerah dari kabupaten/kota pada tahun tertentu dibagi dengan total pendapatan daerah kabupaten/kota pada tahun tersebut dikali dengan seratus persen. Maka apabila ditemukan hasil DF yang tinggi maka dapat disimpulkan derajat fiskal daerah tersebut tinggi. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

- Tenaga Kerja

Tenaga kerja dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja sendiri digunakan untuk melihat besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan

kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

- Pajak Daerah

Pajak daerah diperoleh dari perhitungan dari total pajak suatu kabupaten/kota dibagi total PDRB kabupaten/kota tersebut dikali dengan seratus persen. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

- Aglomerasi

Aglomerasi merupakan produk yang diproduksi dari suatu wilayah Kabupaten/Kota yang dilihat melalui PDRB Kabupaten/Kota tersebut terhadap PDRB propinsi dalam penelitian ini adalah Jawa Tengah. Aglomerasi ini dapat melihat bagaimana pemusatan aktivitas pada kabupaten/kota di Jawa Tengah terhadap pertumbuhan perekonomiannya. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah indeks.

1.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data dari beberapa publikasi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan lain-lain.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan Data yang digunakan adalah Jenis data dalam penelitian ini merupakan panel atau data longitudinal. Data panel

(data longitudinal) adalah kumpulan data yang diteliti pada rentang waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan data dengan rentang waktu dari tahun 2001 sampai tahun 2011 dengan studi kasus kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah.

1.3. Metode Analisis

1.3.1. Alat Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Sektor Publik

Dalam menghitung dalam dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi sektor public daru melalui beberapa tahapan metode analisis. Pertama, menghitung dan menjelaskan kinerja setor publik dengan *Public Sector Performance* (PSP), kemudian menghitung dan menjelaskan tentang efisiensi sektor public dengan *Public Sector Efficiency* (PSE).

***Public Sector Performance* (PSP) dan *Public Sector Efficiency* (PSE)**

Salah satu fungsi desentralisasi fiskal adalah selain untuk mendekatkan pemerintah pada rakyat juga untuk menciptakan efisiensi penyediaan sektor publik pada pemerintah daerah. Dengan mengacu jurnal penelitian dari Akhmad Syakir Kurnia yang merujuk pada Antonio Afonso, L Schuknecht, dan Vito Tanzi (2003) serta jurnal penelitian Antonio Afonso, L Schuknecht, dan Vito Tanzi (2005) menghitung kinerja setor public dan efisiensi sektor public dengan menggunakan metode *Public Sector Performance* (PSP), *Public Sector Efficiency* (PSE). Perhitungan dengan menggunakan PSP dan PSE, masing-masing metode menghitung beberapa sub indikator yang dibagi menjadi dua, yaitu indikator sosio ekonomi dan indikator musgravian. Hal ini berarti nilai PSP sangat tergantung

dari indikator-indikator tersebut, yaitu indikator sosio ekonomi dan indikator musgravian.

$$PSP_i = \sum_{j=1}^n PSP_{ij} \quad (3.1)$$

Dimana:

i = Unit pemerintah I atau dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah i.

j = Kinerja unit pemerintah pada sektor j atau dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah pada sektor j.

Nilai PSP merupakan fungsi dari berbagai kinerja sosial ekonomi.

$$PSP_{ij} = f(I_k) \quad (3.2)$$

Di mana:

i : indikator musgravian dan indikator sosial ekonomi

k : sub indikator dalam masing-masing indikator musgravian dan indikator sosial ekonomi

Oleh karena itu, perubahan pada *Public Sector Performance* (PSP) tergantung pada perubahan nilai-nilai indikator musgravian dan indikator sosial ekonomi yang relevan. Atau dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$\Delta PSP_{ij} = \sum_{i=k}^n \frac{\partial f}{\partial I_k} \Delta I_k \quad (3.3)$$

Untuk menaksir *Public Sector Performance* (PSP), dalam penelitian ini menggunakan 6 sub indikator kinerja publik yaitu kesehatan, pendidikan, kemiskinan, distribusi, stabilitas, dan kinerja ekonomi. Komposisi total indikator PSP yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh persamaan 3.1.

Berikutnya untuk menghitung indikator efisiensi sektor publik dengan indeks *Public Sector Performance* (PSP). Berdasarkan persamaan 3.1 dan persamaan 3.3, nilai indikator efisiensi sektor publik dapat dihitung dengan cara membandingkan antara nilai indeks kinerja sektor publik yang diukur melalui indikator *Public Sector Performance* (PSP) dengan sejumlah belanja publik yang relevan (PEX). Dengan demikian indeks *Public Sector Efficiency* (PSE) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PSE_i = \frac{PSP_i}{PEX_i} \quad (3.4)$$

$$\frac{PSP_i}{PEX_i} = \sum_{j=1}^n \frac{PSP_{ij}}{PEX_{ij}} \quad (3.5)$$

Marginal Productivity dari pengeluaran publik bernilai positif dan menurun,

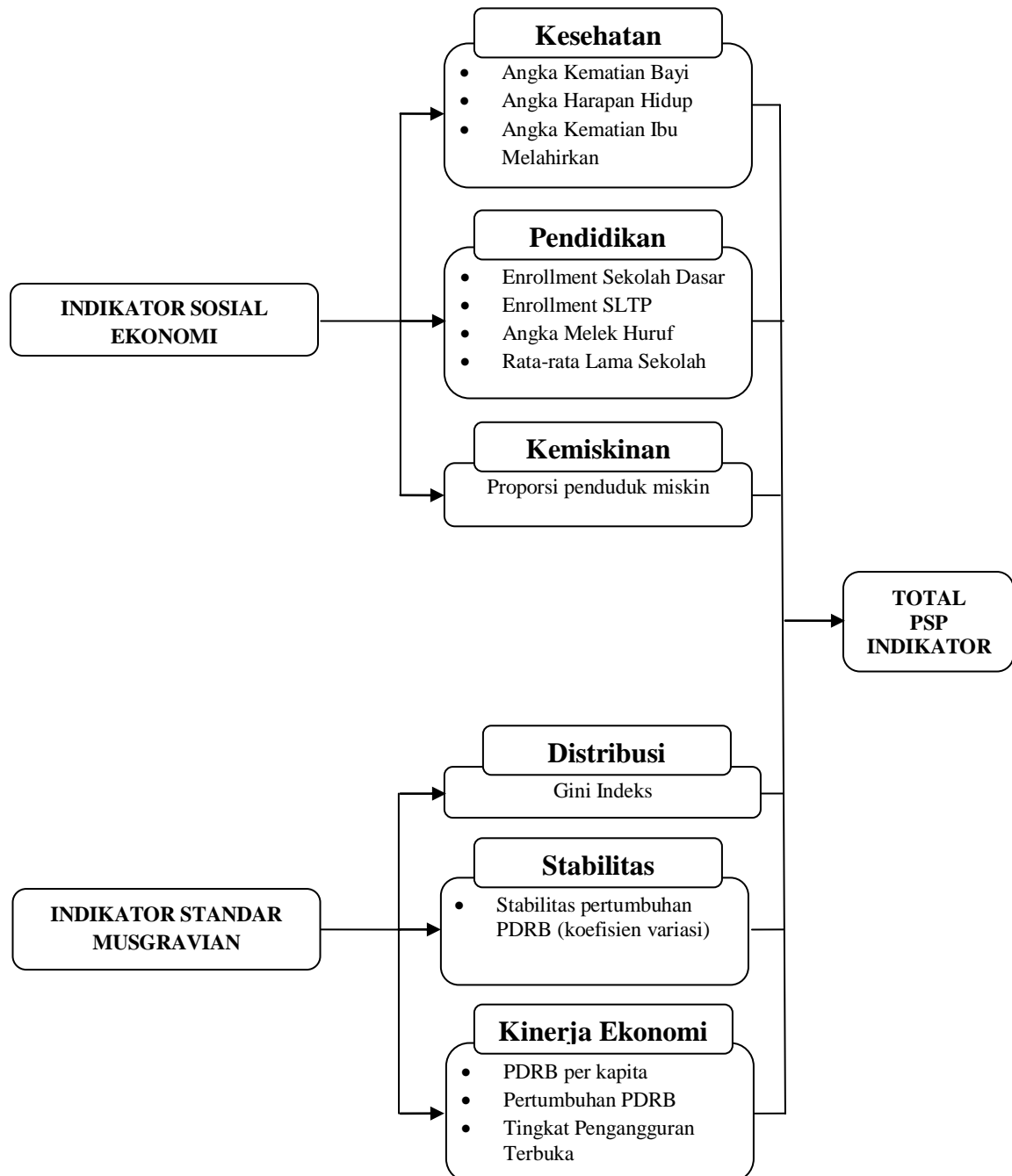
maka:

$$\frac{\partial PSE_{ij}}{\partial PEX_{ij}} > 0, \frac{\partial^2 PSE_{ij}}{\partial PEX_{ij}^2} < 0 \quad (3.6)$$

di mana :

PEX = rata-rata pengeluaran publik (normalisasi)

Gambar 3.1

Total Indikator *Public Sector Performance* (PSP)

Sumber: Afonso dkk (2005) dengan modifikasi

Untuk menghasilkan kinerja sektor publik dari berbagai komponen indikator yang mempunyai satuan yang berbeda, maka dilakukan normalisasi data untuk tiap indikator kinerja. Normalisasi dilakukan dengan menghitung rata-ratanya, dan setiap nilai dibagi dengan nilai rata-ratanya tersebut. Sedangkan untuk indikator dengan orientasi kinerja yang terbalik (misalnya pengangguran yaitu semakin tinggi tingkat pengangguran semakin buruk kinerja ekonomi unit Pemerintah daerah), normalisasinya dilakukan dengan pembagian nilai rata-ratanya dengan nilai sub indikator tersebut.

1.3.2. Alat Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Metode analisis yang untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang menyangkut dengan permasalahan di dalam penelitian. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisa informasi kuantitatif, dalam penelitian ini menggunakan estimasi model regresi dengan *common effect* dengan penggunaan data panel. Sehingga perlu digunakan model ekonometrika untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan menyangkut penelitian ini.

Oleh karena itu untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, digunakan analisis regresi menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Perhitungan model ini dilakukan dengan program EViews 7.

3.3.2.1. Estimasi Model Regresi

Model yang digunakan sebagai dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Model Pertumbuhan Ekonomi: } PE = f(DF, PD, TK, AG) \quad (1.1.)$$

Dimana:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

DF = Desentralisasi Fiskal

PD = Pajak Daerah

TK = Tenaga Kerja

Ag = Aglomerasi

Kemudian Model dasar (1.1.) diturunkan menjadi model ekonometrika yang berbentuk sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 TK_{it} + \beta_4 Ag_{it} + \mu_{it} \quad (1.2.)$$

Dari model ekonometrika di atas dapat dijelaskan i berfungsi sebagai *cross section* dan t berfungsi periode waktu. Dari model ekonometrika diatas di dalamnya terdiri dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel-variabel tersebut mempunyai penjelasan sebagai berikut:

- PE = Pertumbuhan Ekonomi yang diukur melalui laju pertumbuhan PDRB per kapita kabupaten/kota atas dasar harga konstan.
- DF = Desentralisasi Fiskal, dilihat derajat DF yang diukur dengan menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD)
- TK = Tenaga Kerja yang diukur dengan jumlah angkatan kerja pada Kabupaten/Kota tersebut (Provinsi Jawa Tengah).

- PD = Pajak Daerah yang diukur dengan rasio total pajak daerah masing-masing Kabupaten/Kota terhadap total PDRB (persentase).
- Ag = Aglomerasi yang diukur dari PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB Propinsi Jawa Tengah.

3.3.2.2. Pengujian Asumsi Klasik

Ordinary Least Squares (OLS) merupakan metode sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan regresi linear terhadap sebuah model. OLS juga merupakan sebuah model yang digunakan untuk meminimalkan penyimpangan yang terjadi dari hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi aktual. *Ordinary Least Squares* juga merupakan sebuah metode regresi yang memiliki keunggulan sebagai estimator linear terbaik yang tidak bias. Sehingga sering digunakan untuk sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Untuk menjadikan hasil regresi memiliki derajat kepercayaan yang tinggi, maka terdapat beberapa uji asumsi klasik yang digunakan. Menurut Gujarati (1995) terdapat sepuluh asumsi yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Model persamaan harus berupa linear.
2. Nilai variabel independen harus tetap meskipun dalam pengambilan sampel yang berulang.
3. Nilai rata-rata penyimpangan harus sama dengan nol.
4. *Homocedasticity*.
5. Tidak terdapat autokorelasi antara variabel.
6. Nilai *covariance* harus sama dengan nol.

7. Jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi.
8. Nilai variabel independen yang bervariasi.
9. Model regresi harus memiliki bentuk yang jelas.
10. Tidak adanya *multicollinearity* antar variabel independen.

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data dapat terdistribusi normal atau tidak didalam model regresi. Untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak, penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera Test* (J-B Test) dan metode grafik. Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai *skewness* dan kurtosis. Apabila J-B Hitung < nilai χ^2 (*Chi-Square*) tabel, maka nilai residual pada fungsi regresi berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independent variable*). Model regresi baik maka seharusnya tidak ada korelasi tinggi antar variabel bebas. Masalah multikolinieritas mengakibatkan adanya kesulitan untuk dapat melihat pengaruh antar variabel. Didalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat dari matriks korelasi. Jika terdapat variabel yang memiliki nilai korelasi mendekati 1, maka model tersebut teridentifikasi multikolinearitas sempurna. Sedangkan jika tidak terjadi multikolinearitas sempurna, maka model regresi tersebut dapat digunakan untuk estimasi.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara variabel menurut runtut waktu atau ruang. Salah satu cara yang digunakan untuk melihat gejala autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson (D-W test). Kriteria dalam pengujiannya adalah:

- a. Apabila nilai dari uji D-W statistik terletak diantara $0 < d < dl$, maka H_0 dinyatakan tidak ada autokorelasi positif ditolak.
- b. Apabila nilai dari uji D-W statistik terletak diantara $4 - dl < d < 4$, maka H_0^* dinyatakan tidak ada autokorelasi negatif ditolak.
- c. Apabila nilai dari uji D-W statistik terletak diantara $du < d < 4 - du$, maka H_0 dinyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun H_0^* dinyatakan tidak ada autokorelasi negatif diterima.
- d. Apabila nilai dari uji D-W statistik $dl \leq d \leq du$, maka ragu-ragu tidak ada autokorelasi positif
- e. Apabila nilai dari uji D-W statistik $du \leq d \leq 4 - dl$, maka ragu-ragu tidak ada autokorelasi negatif

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul pada saat error atau residual model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Akibatnya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah estimator yang diperoleh menjadi tidak efisien. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji park (*Park Test*). Uji ini dilakukan dengan

cara meregresi secara individu terhadap masing-masing variabel independen. Jika ternyata tidak ada hubungan yang signifikan antara residu dengan masing-masing variabel independen maka berarti dalam model tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas dan mengindikasikan telah terjadi homokedastisitas.

3.3.2.3. Pengujian Statistik Analisis Regresi

Untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya digunakan uji statistik. Uji statistik dilakukan dengan mengukur dan melihat koefisien determinasinya (R^2), pengujian koefisien regresi secara serentak (uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (uji t).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan besar distribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga koefisien determinasi juga mengukur variasi turunan Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Bila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati angka 1, berarti variabel independen semakin mendekati hubungan dengan variabel dependen, sehingga pengaruh model tersebut dapat dikatakan benar. Jadi, semakin besar nilai dari R^2 , maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil nilai dari R^2 , maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi. Hal ini diperlukan karena dalam suatu penelitian atau observasi, perlu dilihat seberapa jauh model yang terbentuk dapat menerangkan variabelnya.

Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas dalam penelitian yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis nol (H_0) yang hendak di uji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0,$$

artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_1) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_1 : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0,$$

artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Rumus untuk memperoleh F hitung dapat dilihat sebagai berikut:

$$\mathbf{F \ hitung} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(N-k)}$$

Dengan:

R^2 = koefisien determinasi

N = jumlah pengamatan/sampel

k = jumlah variabel independen

Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan 2 cara, yaitu :

Pertama, dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel:

- a) Apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b) Apabila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Dengan tingkat probabilitas 5 persen atau $\alpha = 0,05$ dan nilai df (*degree of freedom*) = $(n-k-1) = (210 - 4 - 1) = (205)$, maka dapat diketahui nilai F tabel sebesar 5,281

Kedua, dengan menggunakan angka signifikansi:

- a) Apabila angka probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b) Apabila angka probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pertama dengan menentukan formulasi hipotesis:

1. Uji t untuk variabel desentralisasi fiskal (DF)
 - $H_0 : b_1 \leq 0$: Tidak ada pengaruh positif variabel desentralisasi fiskal (DF) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE).
 - $H_a : b_1 > 0$: Terdapat pengaruh positif variabel desentralisasi fiskal (DF) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi(PE)
2. Uji t untuk variable pajak daerah (PD)
 - $H_0 : b_1 \leq 0$: Tidak ada pengaruh positif variabel pajak daerah (PD) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE).
 - $H_a : b_1 > 0$: Terdapat pengaruh positif variabel pajak daerah (PD) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE)
3. Uji t untuk variabel tenaga kerja (TK)

- $H_0 : b_1 \leq 0$: Tidak ada pengaruh positif variabel tenaga kerja (TK) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE).
- $H_a : b_1 > 0$: Terdapat pengaruh positif variabel tenaga kerja (TK) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE)

4. Uji t untuk variabel Aglomerasi (Ag)

- $H_0 : b_1 \leq 0$: Tidak ada pengaruh positif variabel Aglomerasi (Ag) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE).
- $H_a : b_1 > 0$: Terdapat pengaruh positif variabel Aglomerasi (Ag) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE)

Kedua, dengan kriteria pengujian

Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Rumus untuk memperoleh untuk mendapatkan nilai t hitung adalah:

$$t \text{ hitung} = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

dimana:

β_i = koefisien regresi

se= standar eror

Dasar pengambilan keputusan :

1. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel :

- a) Apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

- b) Apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan angka signifikan 5 % ($\alpha = 0,05$) dan nilai df (*degree of freedom*) $n-k$ ($210 - 5$) = 205

2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi

- a) Apabila angka probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b) Apabila angka probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima